

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PARTISIPASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS**

Oleh

AGUS NURULSYAM SUPARMAN

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Diantaranya pelaksanaan program pembangunan tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan sebagai akibat masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis? Dalam penelitian ini akan digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif. Pengumpulan data, peneliti menggunakan prosedur seperti (1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap member cek. Alat pengumpul data yaitu wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat cukup baik dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa selama ini dengan adanya pelaksanaan program PNPM masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat memperoleh perguliran dana untuk menambah kegiatan usahanya. 2) Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis seperti masyarakat kurang berperan dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan mereka dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka, Kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program penganggaran yang berpihak kepada masyarakat masih rendah. 3) terdapat upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program, melakukan pemetaan terhadap keinginan masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran biaya yang diberikan oleh pemerintah. 4) strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

Kata Kunci : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan untuk memberdayakan peranan masyarakat di daerah. Mengingat salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting menurut Wasistiono (2003:41) adalah "Memberikan pelayanan umum kepada

masyarakat, oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai "Pelayan Masyarakat" (*public servant*). Pelayanan yang diberikan antara lain bertujuan agar masyarakat pada akhirnya mampu melayani diri sendiri sehingga kebergantungan pada pemerintah menjadi terbatas.

Pemberdayaan yang dilaksanakan sampai saat ini belum mampu mengatasi permasalahan yang terjadi antara lain berupa kemiskinan yang tidak pernah ada pangkal ujungnya. Mengatasi kemiskinan membutuhkan keterlibatan semua

pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganan yang ada selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur.

Guna mengatasi berbagai permasalahan mendasar tersebut, diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di pedesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik; dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor.

Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan serta cakupan pembangunan diharapkan dapat berpihak pada masyarakat miskin sejalan dengan upaya meningkatkan kesetaraan jender. Dampak signifikan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan ini dapat terlihat dari kenaikan belanja rumah tangga pedesaan. Fenomena ini sejalan dengan hasil studi yang telah dilakukan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. PNPM Mandiri Pedesaan yang menunjukkan adanya peningkatan belanja rumah tangga yang cukup besar dibandingkan kecamatan non-program. Selanjutnya semakin lama sebuah

kecamatan menerima bantuan program, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan belanja rumah tangga pedesaan. (Ningnurati, 2011: i)

Ada beberapa kecenderungan baru dalam pemikiran tentang pembangunan pedesaan. Diantaranya ialah munculnya konsep "*People Centered Development*" dari Korten dan Klaus (1994), dimana Korten memberikan pengertian *People Centered Development* sebagai pendekatan yang mementingkan inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber utama pembangunan dan yang menekankan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan.

Berdasarkan pandangan tersebut, pendekatan partisipatif merupakan konsep yang perlu dikembangkan dan menetapkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan tersebut lebih bersifat memberdayakan masyarakat atau dapat disebut dengan model partisipasi masyarakat. Dasar proses partisipasi masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka menjadi lebih baik. Proses menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Partisipasi menjadi instrumen yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati manfaat dari kebijakan yang dibuat pihak pemerintah. Di dalam setiap program pembangunan untuk mewujudkan kehidupan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, karena proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan tahap pelaksanaan.

Kabupaten Ciamis pada tahun 1998 sampai tahun 2006 telah mendapatkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Tahun 2007-2008 memperoleh PNPM PPK, sedangkan tahun 2009 sampai sekarang memperoleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM). Cakupan wilayah yang memperoleh bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan pada Tahun 2009 tersebar

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis
AGUS NURULSYAM SUPARMAN

pada 30 kecamatan dan 291 desa yang salah satunya adalah Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Tabel
Program Bantuan PNPM MP Kecamatan Baregbeg Tahun 2011-2013

Jumlah penduduk		Keluarga pra sejahtera		Bantuan PNPM Mandiri	
Laki-laki	Perempuan	Alasan ekonomi	Bukan alasan ekonomi	Sarana /prasarana	Simpan pinjam perempuan (SPP)
9.524	9.919	1.017 KK	638KK	Rp.1.125.000.000	Rp. 375.000.000

Sumber : UPK Kecamatan Baregbeg, 2013.

Kecamatan Baregbeg merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh bantuan PNPM. Berdasarkan data kependudukan tahun 2012, jumlah penduduk Kecamatan Baregbeg 19.443 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 9.524 orang dan perempuan sebanyak 9.919 orang. Kepala keluarga kurang mampu sebanyak 1.653 KK yang terdiri dari 1.017 termasuk pra sejahtera alasan ekonomi dan sebanyak 638 merupakan kelompok pra sejahtera bukan alasan ekonomi. Data tersebut membuat Kecamatan Baregbeg berhak mendapatkan PNPM MP. Pada tahun 2012 Kecamatan Baregbeg mendapatkan dana bantuan PNPM Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000. Dari dana ini digunakan untuk sarana/prasarana sebesar Rp. 1.125.000.000; dan untuk kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) sebesar Rp. 375.000.000.

Dana untuk kegiatan sarana prasarana digunakan untuk berbagai kegiatan seperti perbaikan saluran, perbaikan jalan, pembuatan KIP di setiap desa. Sedangkan SPP dialokasikan untuk 36 kelompok usaha perempuan. Dalam setiap kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga sampai tahap pemeliharaan melibatkan masyarakat karena tanpa partisipasi masyarakat kegiatan PNPM MP ini tidak dapat berjalan dengan lancar.

Hasil identifikasi memperlihatkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan masih menghadapi beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut adalah antara lain:

Dinamika sosial-ekonomi dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Baregbeg ,

menghasilkan variasi dan karakteristik masyarakat, yang berbeda-beda. Di satu sisi menghasilkan masyarakat yang pasrah pada nasib, disisi yang lain, menghasilkan masyarakat pejuang yang tinggi. Kondisi tersebut terkesan diabaikan dan belum terakomodasi dalam perencanaan program sehingga kondisi ini menyebabkan rendahnya kepuasan masyarakat yang dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan masih rendah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Diantaranya pelaksanaan program pembangunan tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan sebagai akibat masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

METODE

Dalam penelitian ini akan digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif. Pengumpulan data, peneliti menggunakan prosedur seperti (1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap member cek. Alat pengumpul data yaitu wawancara dan observasi. Penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober 2013 sampai dengan Juni 2014..

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan dan dapat diketahui makna. Dalam

penelitian ini, analisis data penulis lakukan sebagai berikut:

- (1) Setiap informasi atau data yang diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, studi dokumenter dan angket, langsung dianalisis;
- (2) Penganalisisan yang dilakukan setiap selesai pengumpulan data, diikuti dengan interpretasi dan elaborasi untuk menemukan makna yang terkandung didalamnya;
- (3) Membuat kategorisasi dari unit-unit data dengan mengklasifikasi data, sehingga data mentah yang terkumpul dapat ditransformasikan dengan sistematis menjadi unit-unit yang dapat dipilahkan menurut karakteristiknya. Disini dibuat batas-batas setiap unit untuk keperluan analisis berikut. Proses unitisasi ini dilakukan bukan saja setelah data terkumpul semua akan tetapi dilakukan pula selama proses pengumpulan data;
- (4) Mengadakan triangulasi, yaitu membandingkan informasi data yang sama yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, studi dokumenter).
- (5) Mengadakan *member check* dengan kepala sebagai sumber utama informasi (data) dalam penelitian ini. Kegiatan *member check* ini penulis lakukan setiap selesai mengadakan observasi dan wawancara dengan responden. Sedangkan *member check* terakhir dilakukan setelah selesai pengumpulan data secara keseluruhan;
- (6) Mengadakan diskusi dengan teman-teman sejawat dalam usaha menguji validitas-data yang terkumpul;
- (7) Memberikan tafsiran sebagai usaha menemukan makna yang terkandung dan diperoleh dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara terus menerus sejak saat kegiatan pengumpulan data di lapangan sampai selesai pengumpulan data secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Nasional PEMBERDAYAAN Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bareg Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat cukup baik dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bareg Kabupaten Ciamis hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa selama ini dengan adanya pelaksanaan program PNPM masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat memperoleh perguliran dana untuk menambah kegiatan usahanya.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program PNPM dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di dalam proses perencanaan kegiatan PNPM seluruh masyarakat sudah di undang untuk berpartisipasi. Menurut informan, pelaksanaan PNPM Mandiri memerlukan dukungan dari berbagai pihak meliputi : (1). Lembaga yang mendukung dari aspek kebijakan seperti DPR, DPRD, Pemerintah Daerah. Posisi Pemerintah dan DPRD dalam hal ini menjadi dominan, sebab PNPM Mandiri sebagai program pemerintah (pusat) akan memiliki fase akhir dan diteruskan menjadi program pemerintah daerah. (2). Lembaga yang mendukung terjadinya partisipasi untuk mengembangkan dan mereplikasi program, seperti lembaga donor, bantuan dunia usaha/ industri, (3) pihak-pihak yang memberikan dukungan publik dari kelompok peduli yaitu kelompok profesional, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga atau kelompok peduli lainnya dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka terlihat pentingnya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan PNPM Mandiri perdesaan .

Sementara itu tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan setelah adanya program PNPM mandiri perdesaan. PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah gerakan nasional dalam wujud pembangunan berbasis masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis
AGUS NURULSYAM SUPARMAN

masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri ini dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melalui pendampingan oleh fasilitator. Secara substansial pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dalam penguatan modal usaha, pemberdayaan masyarakat melalui padat karya, pelayanan pendidikan, kesehatan dan akses teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.

Pemberdayaan Masyarakat melalui program PNPM Mandiri menjadikan masyarakat mampu mengidentifikasi masalah/penyebab kemiskinan dan alternatif penyelesaiannya, mampu mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di wilayahnya, mampu memutuskan tindakan yang harus dilaksanakan (peningkatan kemampuan masyarakat berorganisasi dalam skala kelompok dan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan desa/kelurahan). PNPM Mandiri mendorong terjadinya internalisasi pembangunan untuk masyarakat miskin dan marginal penciptaan lapangan kerja, meningkatnya partisipasi penduduk miskin dalam membangun, pembentukan modal sosial, dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Dengan adanya program PNPM Mandiri Pedesaan memang sudah banyak kemiskinan yang sudah dapat teratasi, tetapi apakah program tersebut benar-benar sudah membantu. Kenyataan bahwa sejak pertama kali diimplementasikan, belum mampu mengubah peta kemiskinan di desa hal ini tentu menjadi pekerjaan berat bagi PNPM yang diharapkan mampu menuntaskan program kerjanya yang artinya masyarakat pedesaan telah mampu mensejahterakan diri sendiri.

Suatu harapan yang sangat mungkin tercapai mengingat perangkat, strategi, serta system program benar telah disusun sesempurna mungkin dalam mencapai tujuan. Setidaknya ada tujuh hal yang harus diwaspadai bagi para pelaku PNPM dalam pelaksanaan di lapangan, yang tanpa disadari merupakan bom

waktu yang siap menghancurkan semua perjalanan PNPM dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat yang antara lain :

1. Pelaku terlalu administratif sehingga terkesan mengabaikan beberapa hal penting asalkan secara pelaporan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Karena terlalu administrative ketakutan salah menyebabkan Fasilitator seolah berperan ganda sebagai eksekutor dan masyarakat hanya menjadi objek penderita. Fatalnya, hal tersebut bukannya menstimulasi keberdayaan masyarakat malah semakin memperburuk sikap ketergantungan masyarakat.
3. Pelaku tidak mampu mengidentifikasi penyebab kemiskinan di desa sehingga dana BLM yang alih-alih berfungsi sebagai stimulan keberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan hanya menjadi alat memperlengkap prasarana desa tanpa tujuan yang jelas.
4. Pelaku tidak mampu melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat sehingga yang terjadi adalah system partisipasi semu dimana masyarakat hanya melaksanakan petunjuk Fasilitator tanpa mampu menyerap pembelajaran yang ada di dalamnya.
5. Pelakur kurang meng-update pengetahuan sehingga proses transfer pengetahuan juga menjadi kurang maksimal bahkan terkesan memutar kaset lama yang membosankan.
6. Tuntutan laju progress kegiatan sesuai alur tahapan menyebabkan beberapa proses pembelajaran terkesan asal ada dan diabaikan esensinya. Padahal pendidikan sebagai alat pembebasan manusia dan keberpihakan kepada rakyat merupakan sumber penting berkembangnya wacana partisipasi dalam pembangunan
7. Kurangnya partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin sudah dianggap sebuah kewajaran dan bukan sama sekali kegagalan fasilitasi.

Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis

Dengan kendala-kendala yang sudah ada maka solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala seperti yang telah ada adalah dengan cara antara pelaku program PNPM Mandiri Pedesaan dengan masyarakat saling bekerjasama. Pemerataan bantuan dan pengetahuan pada masyarakat harus merata dan masyarakat harus berpartisipasi dalam program PNPM Mandiri Pedesaan. Selain itu juga dapat diadakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah yang kemudian penyelesaian masalah tersebut kemudian disosialisasikan pada masyarakat. Sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi.

Oleh karena itu menurut Roolisasi (2008:211) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan modal sosial yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat akan meningkat seiring meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permukiman di sekitarnya serta meningkatnya keterlibatan dalam organisasi sosial.

Strategi Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Pedesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

Sedangkan mengenai sistem perencanaan pembangunan partisipatif bertumpu pada kekuatan pengalaman yang telah dilakukan melalui perencanaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAN Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMN/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan disebut dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDN). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAN prioritas usulan sampai dengan MAN penetapan usulan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat cukup baik dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa selama ini dengan adanya pelaksanaan program PNPM masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat memperoleh perguliran dana untuk menambah kegiatan usahanya.
2. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hambatan dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang antara lain :
 - a. Masyarakat seringkali kurang berperan dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan mereka dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka. Salah satu penyebabnya karena masih ada anggapan bahwa masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini masyarakat selalu ditempatkan pada posisi sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.
 - b. Kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat melalui program penganggaran yang berpihak kepada masyarakat masih rendah sehingga tidak semua aspirasi yang berkembang di masyarakat dapat direalisasikan dan hal inilah yang menjadi penyebab rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program yang direncanakan.

- c. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan masih rendah sehingga menyebabkan komunikasi antara pelaksana dan pemerintahan yang terkait tidak berjalan dengan lancar.
3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program yang dilaksanakan sehingga diharapkan dengan meningkatnya peran masyarakat maka kesadaran masyarakat terhadap setiap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan meningkat.
 - b. Melakukan pemetaan terhadap keinginan masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran biaya yang diberikan oleh pemerintah sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
 - c. Meningkatkan keterpaduan antar instansi terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.
 4. Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan

tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja dan Hikmat, 2001 *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Apandi. 2010. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*, Traju, Jakarta.
- Arikunto dan Afrudin 2008. *Evaluasi Program dan Kebijakan Pemerintah*, Badan Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial Angkatan II, tanggal 4-15 Oktober 1994, Yogyakarta.
- Arikunto Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Penerbit Rinca Cipta, Jakarta.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J., 2002. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Korten, D.C dan Klaus R., 1994. *People Centered Development*, West Hartford, Kumarian Press, Connecticut. (Online) tersedia di <http://riset.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/Strategi-Pembangunan-Desa-Terpadu-Suatu-Pilihan-Paradigma-People-Centered>
- Firmansyah. 2009. *Partisipasi Masyarakat*. [Online]. Tersedia: <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>
- Hadisubroto, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, Bandung: Alfabeta.
- Hutomo, Mardiyatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Aplikasi*. Bappenas. Jakarta.
- Kartasasmita, 1996: *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Kepmenkokesra No. 23/Kep/ Menko/ Kesra/VII/2007 tentang Tim Pengendali PNPM Mandiri.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang pedoman umum Program Nasional

- Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
- Lexy J., Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Makmur, Setia. 2005. "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D)". Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Nasdian FT. 2006. *Pengembangan Masyarakat (Community Development). Bagian Sosiologi dan Pengembangan Masyarakat*: Institut Pertanian Bogor.
- Nasution. 2008. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi. 2008. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada. University Press.
- Perpres No. 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
- Pratiwi. 2008: *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prijono dan Pranata. 1996. *Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : CSIS.
- Robinson. 1997. *Manajemen Strategik, Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, Binarupa Aksara: Jakarta.
- Saldiah. 2000: *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subino 2008. *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Bandung: ABA Yapari.
- Sudjana. 2010. *Metoda Statistika*. Bandung: PT. Tarsito.
- Sugiyono, 2012. *Statistik Untuk Penelitian*, Alfabeta Bandung.
- Suharsimi. 2008. *Evaluasi Program. Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarwan. 2004: *Pembangunan untuk Rakyat*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Sumodiningrat,
2001 *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suratman 2000. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Era Otonomi*, Jakarta : Dirjen PMD DDN-OTDA
- Tayibnabis. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wasistiono, Sadu 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Jakarta; Fokus Media.
- Wicaksono 2010 *Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah